

ABSTRAK

Rumah susun merupakan salah satu alternatif Pemerintah dalam menanggulangi kondisi lahan yang terbatas yaitu dengan cara memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti rumah susun yang ada di 24 Ilir, Kasnariansyah dan Kertapati. Namun, permasalahan yang terjadi saat ini ialah bagaimana kelanjutan dari kebijakan Pemerintah dan pihak pengelola dalam rencana rekonstruksi rumah susun tersebut mengingat perlu adanya perbaikan pada rumah susun yang sekarang sudah terlihat kumuh dan adanya kerusakan bangunan terutama pada rumah susun 24 Ilir. Rencana yang sudah ada dari beberapa tahun lalu hingga saat ini belum juga terlaksana dan akhirnya membuat para penghuni rumah susun berpikir bahwa suatu saat mereka akan terusir.

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan publik tata kota Palembang terhadap rencana rekonstruksi rumah susun sederhana sewa dan faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya rencana rekonstruksi rumah susun sederhana sewa kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan data primer ialah melalui wawancara. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini ialah buku, jurnal, arsip atau laporan dari tempat penelitian yang ada kaitannya. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap rencana rekonstruksi rumah susun ialah nantinya rumah susun 24 Ilir diharuskan untuk diperbaiki namun tidak akan mengubah bentuk awalnya. Sedangkan untuk rumah susun Kasnariansyah dan Kertapati akan dibenahi yang rusak saja dan diperbagus ulang namun tidak adanya penggusuran karena pada dasarnya rumah susun ditujukan kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah baik positif dan negatif tentunya diperlukan adanya musyawarah terlebih dahulu dan memerlukan waktu yang panjang untuk menghasilkan jawaban yang bertujuan untuk kepentingan bersama terutama bagi penghuni rumah susun.

Kata kunci : kebijakan publik, perencanaan tata kota, rumah susun, Palembang

ABSTRACT

Flats are one of the Government's alternatives in overcoming limited land conditions, namely by providing decent housing for low-income people such as flats in 24 Ilir, Kasnariansyah and Kertapati. However, the problem that occurs today is how to continue the policy of the Government and the management in the apartment reconstruction plan considering the need for repairs to the flats which now look shabby and the damage to buildings, especially in 24 Ilir flats. The plan that has existed from several years ago until now has not been implemented and finally makes the residents of the flats think that one day they will be evicted.

This study discusses Palembang urban planning public policy towards the reconstruction plan of simple rental flats and what factors are behind the emergence of the reconstruction plan of simple rental flats in the city of Palembang. This research uses descriptive qualitative methods and primary data is through interviews. While secondary data in this study are books, journals, archives or reports from research places that are related. Data analysis techniques use qualitative analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification.

The results of this study show that the government's policy towards the reconstruction plan of flats is that later the 24 Ilir flats are required to be repaired but will not change their initial shape. As for Kasnariansyah and Kertapati flats, only damaged and refurbished flats will be repaired, but there will be no evictions because basically the flats are intended for LIC (Low Income Communities). Every policy issued by the Government, both positive and negative, certainly requires deliberation in advance and requires a long time to produce answers aimed at mutual interests, especially for residents of flats.

Keywords: public policy, urban planning, flat, Palembang